

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

KONSIDERAN	1
B A B I KETENTUAN UMUM	3
B A B II URUSAN PEMERINTAHAN	3
B A B III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5
B A B IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH	7
B A B V URUSAN PEMERINTAHAN SISA	7
B A B VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	7
B A B VII KETENTUAN PERALIHAN	8
B A B VIII KETENTUAN PENUTUP	8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	
I. U M U M	10
II. PASAL DEMI PASAL	12
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA :	
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	15
B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	17
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM ..	19
D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	26
E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG ..	37
F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	38
G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	40
H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN	44
I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	47
J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	49
K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	52

L.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARAGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	55
M.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	58
N.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN	60
O.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	66
P.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	67
Q.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	68
R.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	72
S.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	75
T.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	78
U.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	85
V.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	89
W.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	90
X.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	91
Y.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	91
Z.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	93
AA.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	106
BB.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	110
CC.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	113
DD.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	117
EE.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	119